

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nawacita Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2015-2019 tentang kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UMKM pada butir ke enam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Nawacita butir ke tujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan Nawacita butir ke-6 dan ke-7 tersebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Kemandirian ekonomi nasional adalah arah yang dapat dicapai untuk pembangunan ekonomi Indonesia dimasa mendatang, jika koperasi dan UMKM menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Situmorang, 2015).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Andil UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional tidak diragukan lagi, penyerapan UMKM terhadap tenaga kerja di Indonesia mencapai 97% dan kontribusi UMKM pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 57%, selain menjadi penyumbang PDB Indonesia UMKM juga berperan penting dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM juga tahan terhadap krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 – 1998, karena UMKM yang ada tidak tergantung

pada modal besar yang berasal dari luar negeri yang menggunakan mata uang asing, sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan yang berskala besar sangat berpotensi mengalami imbas dari krisis moneter tahun 1998 (Bank Indonesia, 2015). Data badan pusat statistik menunjukkan bahwa pasca krisis moneter tahun 1998 jumlah UMKM yang ada di Indonesia tidak berkurang, bahkan mengalami peningkatan sebesar 2,98% ditahun 1999 dan naik lagi menjadi 4,94% pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa krisis moneter tidak berpengaruh terhadap UMKM, bahkan meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Secara legal usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 (UU UMKM). Berdasarkan Undang-Undang tersebut UMKM diberi batasan-batasan tertentu, sehingga ada kategori-kategori dimana usaha disebut usaha mikro, atau usaha kecil atau usaha menengah. Secara umum usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) (Machmud dan Sidharta, 2013).

Tabel 1.1

Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah UMKM	Unit	52.764. 603	53.823. 732	55.206. 444	56.534. 592	57.895. 721
2.	Pertumbuhan jumlah UMKM	Persen	2,64	2,01	2,57	2,41	2,41
3.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96.211. 332	99.401. 775	101. 722. 458	107.657. 509	114 144 082
4.	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2,33	3,32	2,33	5,83	6,03
5.	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 212 599,30	1 282 571,80	1 369 326,00	1 504 928,20	1 536 918,80
6.	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	4,02	5,77	6,76	9,90	5,89
7.	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162 254,52	175 894,89	187 441,82	208 067,00	182 112,70
8.	Pertumbuhan Nilai ekspor UMKM	Persen	-8,85	8,41	6,56	11,00	9,29

Sumber: BPS tahun 2016

Dari data perkembangan UMKM yang ada di Indonesia tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,64 %, jumlah tenaga kerja yang terserap karena adanya UMKM tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,03%, sumbangan PDB UMKM terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 9,90% dengan tenaga kerja terserap sebanyak 1.504.928,20 orang pekerja.

Secara keseluruhan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan hal ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian di Indonesia juga semakin tinggi di tunjukkan oleh sumbangan PDB UMKM yang terus meningkat.

Di Jawa Tengah, pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sektor UMKM Jawa Tengah juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, dimana per Desember 2015 tenaga terserap karena UMKM binaan mencapai 714.740 orang. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan *One Village One Product (OVOP)* dengan pengembangan desa mandiri produktif, selain itu pemerintah provinsi Jawa Tengah juga memberikan percepatan izin usaha mikro kecil sehingga mendapatkan penghargaan percepatan penerbitan izin usaha mikro kecil terbanyak se-Indonesia dari Menteri koperasi dan UMKM Indonesia (LAKIP Dinkop dan UMKM Jateng, 2015).

Tabel 1.2

Data UMKM Jawa Tengah Tahun 2012-2015

No.	Deskripsi Data	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah UMKM	Unit	80.583	90.339	99.681	108.937
	Produksi/Non Pertanian	Unit	26.171	30.103	34.309	38.084
	Pertanian	Unit	13.242	15.819	17.738	19.010
	Perdagangan	Unit	32.055	33.958	35.829	38.243
	Jasa	Unit	9.115	10.459	11.805	13.600
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	345.622	480.508	608.893	740.740
3.	Asset	Rp. Milyar	6.816	9.634	13.947	19.046
4.	Omzet	Rp. Milyar	18.972	20.345	24.587	29.113

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2016

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat pemberdayaan peran serta masyarakat (LAKIP, 2016), jadi Pemerintah Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerah, infrastruktur, ekonomi daerah dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM dapat menggerakkan para pelaku UMKM yang ada di daerahnya untuk memaksimalkan produktivitas usaha.

Kabupaten Kudus, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menggunakan hak otonomi daerahnya dengan maksimal, salah satunya dengan mengembangkan potensi masyarakatnya. Demi terwujudnya pemerataan perekonomian di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah menjadikan pemberdayaan UMKM sebagai pilar utamanya untuk program prorakyat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengkampanyekan UMKM menjadikan Bupati Kudus banyak meraih penghargaan bertaraf nasional, seperti penghargaan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah UMKM yang ada di Kudus berjumlah 13.700 unit usaha (Koran Sindo, 05 November 2016). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan menggagas Kredit Usaha Produktif (KUP) yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Jika dilihat secara makro, peran UMKM bagi kemajuan ekonomi Indonesia tidak diragukan lagi, kedudukannya sebagai aktor utama dalam kemajuan ekonomi bangsa, seperti tersedianya lapangan kerja yang memadai, membantu dalam pemberdayaan sosial masyarakat, menjadi sumber inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan usaha, serta sumbangan UMKM terhadap neraca pembayaran melalui ekspor. Di kabupaten Kudus lapangan usaha industri masih menjadi kontributor utama penyumbang PDRB tahun 2015, pada peringkat pertama didominasi oleh industri pengolahan dengan jumlah 81,09% yaitu industri tembakau

(rokok) yaitu 34,25% dan disusul oleh industri pakaian jadi sebanyak 19,89% dan diurutan terakhir ada industri pengolahan makanan dan minuman sebanyak 8,29% (Kudus dalam Angka, 2016:415).

Tidak dipungkiri, industri tembakau merupakan industri andalan di Kabupaten Kudus, karena jargonnya “Kudus Kota Kretek” sudah melekat pada diri kabupaten Kudus. Selain industri tembakau, industri pengolahan lainnya yang menjadi andalan kabupaten Kudus adalah industri konveksi pembuat pakaian jadi, penyebaran industri pakaian jadi telah menjamur di beberapa kecamatan, bahkan ada dua Desa di satu kecamatan yang menjadi sentra industri konveksi di Kabupaten Kudus, yaitu Desa Klumpit dan Desa Padurenan. Pasalnya, diantara sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, Kecamatan Gebog lah yang menjadi sentra industri pakaian jadi (Kecamatan Gebog dalam Angka, 2016:8).

Banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, perlu adanya evaluasi atau studi literatur demi kemajuan UMKM yang ada. Penilaian kinerja terhadap UMKM menjadi dasar untuk mengevaluasi UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM Industri Pakaian Jadi di Kabupaten Kudus” sebagai judul penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi terhadap kinerja UMKM pakaian jadi di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pelaku usaha UMKM :
 - a. Sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja para pelaku UMKM.
 - b. Sebagai masukan untuk industri pakaian jadi dalam pengembangan usahanya.

2. Bagi peneliti :
 - a. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

